

**TAHUN
2025**

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENJA
(P-RENJA)**

**KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	21
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
BAB IV Penutup	
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja	33
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	34
4.3. Rencana Tindak Lanjut	35

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun Anggaran 2025. Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2025

PLT. CAMAT KUTOREJO



KUKUH RADIDTYO, SH., MH
PEMBINA

NIP. 19780306 200312 1 004

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan situasi dan kondisi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap perubahan asumsi, kebijakan nasional/daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, seperti refocusing anggaran, realokasi program, pergeseran prioritas pembangunan, atau penyesuaian terhadap target dan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang mengusung visi: ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”***. Visi ini kemudian dijabarkan dalam empat misi pembangunan daerah, di mana Misi Kesatu yaitu “ **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat** “. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029. Sasaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah **“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan** “.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah dimulai dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen induk tahunan pemerintah daerah, perubahan RKPD menjadi dasar utama bagi penyusunan perubahan Renja. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan plafon anggaran dalam Perubahan RKPD. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.” Kecamatan berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal untuk memastikan pelayanan cepat, tepat, bersih dan transparan.

Renstra Perangkat Daerah meskipun bersifat jangka menengah (5 tahunan), Renstra menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa perubahan Renja tetap dalam koridor sasaran strategis dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan Renja menjadi dasar teknokratis bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam merinci perubahan kegiatan, target output, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas baru.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bukan hanya merupakan upaya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah tetap adaptif, responsif, dan efektif menjawab tantangan pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 13. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

32. Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor : 188/ /416-304/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029 pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
33. Keputusan Camat Kutorejo Nomor 11 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya penyusunan dokumen perubahan renja perangkat daerah tahun 2025 adalah :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Daerah;
2. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi faktual, pagu indikatif anggaran, serta hasil evaluasi capaian kinerja;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (RKA dan DPA);
4. Mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Perubahan Rencana Kerja serta keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja Kecamatan serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I tahun Berkenaan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan realisasi triwulan I.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.2. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Memuat terkait perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

2.3. Penalaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Bab III Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Bab IV P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menyebabkan ketidak tercapaian, ketercapaian, maupun capaian yang melampaui target. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melihat dampak capaian terhadap arah pembangunan jangka menengah serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat dan responsif ke depan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapainya tindakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang terbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan I tahun 2025 Rancangan Akhir Renja Kecamatan KutorejoKabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. 2.1 (Formulir E-81)
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I
Kecamatan Kutorejo Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV		I		II		III		IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal		IKM Kecamatan(Indeks)					84																			Kecamatan Kutorejo	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		250.000.000		67.009.000	100	9.000.000		-		-		-		-	-	-	300.000	-	-	0	0	0	300.000	Kecamatan Kutorejo	
3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan(Pelayanan)		250.000.000		67.009.000	1.200	9.000.000		-		-		-		-	0	-	300.000	-	0	-	0	0	300.000	Kecamatan Kutorejo	
4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					19	9.000.000								-	-	-	300.000	-	-	-	-	0	300.000	Kecamatan Kutorejo	
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		1.900.000.000		896.174.100	100	176.900.000		-		-		-		-	41.150.500	-	3.900.000	-	-	0	0	0	45.050.500	Kecamatan Kutorejo	
6		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitasi)		1.900.000.000		896.174.100	34	176.900.000		-		-		-		-	41.150.500	-	3.900.000	-	0	-	0	0	45.050.500	Kecamatan Kutorejo	

7		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)				8	18.100.000									1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	1	3.500.000	Kecamatan Kutorejo
8		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)				6	18.500.000									2	13.254.000	-	-	-	-	-	-	2	13.254.000	Kecamatan Kutorejo
9		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)				7	45.300.000									1	10.750.000	-	3.400.000	-	-	-	-	1	14.150.000	Kecamatan Kutorejo
10		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)				13	95.000.000									1	13.646.500	-	500.000	-	-	-	-	1	14.146.500	Kecamatan Kutorejo
11		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		17.671.573.920	8.532.206.845	82,85	2.579.432.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.561.058	-	255.921.272	-	-	0	0	0	707.482.330	Kecamatan Kutorejo
12		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		200.000.000	44.557.300	100	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	400.000	-	0	-	0	0	2.400.000	Kecamatan Kutorejo
13		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				6	4.200.000									2	1.300.000	-	100.000	-	-	-	-	2	1.400.000	Kecamatan Kutorejo
14		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				23	4.300.000									5	700.000	-	300.000	-	-	-	-	5	1.000.000	Kecamatan Kutorejo
15		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		14.198.436.503	7.076.501.951	100	2.316.932.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.728.355	-	215941302	-	0	-	0	0	626.669.657	Kecamatan Kutorejo
16		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				18	2.316.932.000									15	410.728.355	-	215.941.302	-	-	-	-	15	626.669.657	Kecamatan Kutorejo
17		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		2.465.000.000	582.076.450	100	89.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.432.500	-	19.606.000	-	0	-	0	0	27.038.500	Kecamatan Kutorejo

18		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					1	5.000.000									-	-	-	-	-	-	0		Kecamatan Kutorejo
19		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					2	15.000.000									1	3.500.000	-	-	-	-	1	3.500.000	Kecamatan Kutorejo
20		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12	40.000.000									-	-	-	17.000.000	-	-	0	17.000.000	Kecamatan Kutorejo
21		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2	8.000.000									2	1.313.000	-	1.499.500	-	-	2	2.812.500	Kecamatan Kutorejo
22		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					1	2.000.000									1	619.500	-	206.500	-	-	1	826.000	Kecamatan Kutorejo
23		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3	15.000.000									-	-	-	-	-	-	0		Kecamatan Kutorejo
24		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12	4.000.000									3	2.000.000	-	900.000	-	-	3	2.900.000	Kecamatan Kutorejo
25		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		942.000.000	444.317.044		100	124.400.000		-	-	-	-	-			-	25.667.803	-	18.052.970	-	0	0	43.720.773	Kecamatan Kutorejo
26		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					24	35.000.000									6	10.767.803	-	3.152.970	-	-	6	13.920.773	Kecamatan Kutorejo
27		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					24	89.400.000									6	14.900.000	-	14.900.000	-	-	6	29.800.000	Kecamatan Kutorejo
28		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		1.041.800.000	343.170.100		100	40.600.000		-	-	-	-	-			-	5.732.400	-	1.921.000	-	0	0	7.653.400	Kecamatan Kutorejo

29		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				1	25.600.000									1	2.013.000	-	1.506.500	-	-	-	-	1	3.519.500	Kecamatan Kutorejo
30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3	10.000.000									3	3.719.400	-	-	-	-	-	-	3	3.719.400	Kecamatan Kutorejo
31		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3	5.000.000									-	-	-	414.500	-	-	-	-	0	414.500	Kecamatan Kutorejo
32			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)				3		?								0		-		-		0				
33		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)		200.000.000	44.557.300	100	8.500.000		-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	400.000	-	0	-	0	0	2.400.000	Kecamatan Kutorejo	
34		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				6	4.200.000									2	1.300.000	-	100.000	-	-	-	-	2	1.400.000	Kecamatan Kutorejo
35		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				23	4.300.000									5	700.000	-	300.000	-	-	-	-	5	1.000.000	Kecamatan Kutorejo
36		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		14.198.436.503	7.076.501.951	100	2.316.932.000		-	-	-	-	-	-	-	410.728.355	-	215.941.302	-	0	-	0	0	626.669.657	Kecamatan Kutorejo	
37		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				18	2.316.932.000									15	410.728.355	-	215.941.302	-	-	-	-	15	626.669.657	Kecamatan Kutorejo
38		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		2.465.000.000	582.076.450	100	89.000.000		-	-	-	-	-	-	-	7.432.500	-	19.606.000	-	0	-	0	0	27.038.500	Kecamatan Kutorejo	
39		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1	5.000.000									-	-	-	-	-	-	-	0		Kecamatan Kutorejo	

40		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				2	15.000.000									1	3.500.000	-	-	-	-	-	1	3.500.000	Kecamatan Kutorejo	
41		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				12	40.000.000									-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	0	17.000.000	Kecamatan Kutorejo
42		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				2	8.000.000									2	1.313.000	-	1.499.500	-	-	-	-	2	2.812.500	Kecamatan Kutorejo
43		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)				1	2.000.000									1	619.500	-	206.500	-	-	-	-	1	826.000	Kecamatan Kutorejo
44		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				3	15.000.000									-	-	-	-	-	-	-	0		Kecamatan Kutorejo	
45		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12	4.000.000									3	2.000.000	-	900.000	-	-	-	-	3	2.900.000	Kecamatan Kutorejo
46		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		942.000.000	444.317.044	100	124.400.000		-	-	-	-	-	-	25.667.803	-	18.052.970	-	0	-	0	0	0	43.720.773	Kecamatan Kutorejo	
47		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				24	35.000.000									6	10.767.803	-	3.152.970	-	-	-	-	6	13.920.773	Kecamatan Kutorejo
48		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				24	89.400.000									6	14.900.000	-	14.900.000	-	-	-	-	6	29.800.000	Kecamatan Kutorejo
49		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		1.041.800.000	343.170.100	100	40.600.000		-	-	-	-	-	-	5.732.400	-	1.921.000	-	0	-	0	0	0	7.653.400	Kecamatan Kutorejo	
50		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				1	25.600.000									1	2.013.000	-	1.506.500	-	-	-	-	1	3.519.500	Kecamatan Kutorejo

51		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3	10.000.000									3	3.719.400	-	-	-	-	-	-	3	3.719.400	Kecamatan Kutorejo
52		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3	5.000.000									-	-	-	414.500	-	-	-	-	0	414.500	Kecamatan Kutorejo
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																								36.56 %		
		Triwulan 1	Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4																				
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kegiatan Dilaksanakan sesuai dengan penyusunan anggaran kas																									
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Anggaran APBD yang didapat tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran sesuai kegiatan yang telah disusun																									
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	-																									
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																										

Berdasarkan Tabel 2.1 (Formulir E-81/ Evaluasi Hasil Renja Triwulan II Tahun 2025) Realisasi Keuangan pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, secara total sebesar 17,82%. Adapun untuk Capaian Kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 mencapai 36,56%. Rincian dari Kinerja Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

I. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdapat 5 kegiatan dengan 15 sub kegiatan. Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja pada Program ini tercapai melalui pelaksanaan kegiatan hingga sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun realisasi anggaran pada 2 sub kegiatan secara berurutan adalah sebesar 30,95% dan 16,28%, dengan capaian kinerja sebesar 33% dan 14,28%.

Terkait dengan Capaian Kinerja, pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pada Triwulan I tercapai 2 dokumen dari target 6 dokumen atau sebesar 33%. Adapun untuk sub kegiatan Evaluasi Kinerja PD, pada Triwulan I tercapai 5 Laporan dari target 35 Laporan atau sebesar 14,28%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Adapun realisasi anggaran Triwulan I pada sub kegiatan ini adalah sebesar 17,73% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 89% yaitu dari target Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 18 orang dengan realisasi 16 orang.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini ada 7 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Realisasi anggaran pada Triwulan1 adalah sebesar 0% Masih belum terealisasi.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Realisasi anggaran pada Triwulan I adalah sebesar 23,33% dengan capaian kinerja 50 %.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Realisasi anggaran pada Triwulan I adalah sebesar 0% dengan realisasi kinerja sebesar 0%.
4. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
Realisasi anggaran pada Triwulan1 adalah sebesar 16,41% dengan realisasi kinerja sebesar 30%.
5. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi anggaran pada Triwulan1 adalah sebesar 30,98% dengan realisasi kinerja sebesar 30%.

6. Penyediaan Bahan/Material

Realisasi anggaran pada Triwulan I adalah sebesar 0% dengan realisasi kinerja sebesar 0%.

7. Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi anggaran pada Triwulan I adalah sebesar 50% dengan realisasi kinerja sebesar 50%.

4. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan ini ada 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 30,77% dengan realisasi kinerja sebesar 30%.

2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 16,67% dengan realisasi kinerja sebesar 30%.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Pada kegiatan ini ada 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 7,86% dengan realisasi kinerja sebesar 30%.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 37,19% dengan realisasi kinerja sebesar 30%.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dengan realisasi kinerja sebesar 0%.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Terdapat 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan adalah sebesar 0% dengan realisasi kinerja sebesar 0%.

III. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terdapat 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 4 sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 19,34% dengan realisasi kinerja sebesar 12,5%.

2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 71,64% dengan realisasi kinerja sebesar 33,33%.
3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 23,73% dengan realisasi kinerja sebesar 14,28%.
4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 14,36% dengan realisasi kinerja sebesar 7,69%.

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kutorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	n/a	n/a	n/a	n/a	82	81,9	82
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Laporan	9 Laporan	100%

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	90%	90%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Orang/Bulan	18 Orang	90%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	72	n/a	n/a	n/a	n/a	72	77,99	108%
7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Pegawai	20 Pegawai	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Paket	7 Paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Paket	12 Paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Paket	2 Paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	3 paket	3 Paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	24 paket	24 paket	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	24 laporan	24 laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82 %	n/a	n/a	n/a	n/a	82	100 %	121,95
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	1 Unit	50%
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Unit	3 Unit	100%

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Paket	3 Paket	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	605 Pelayanan	4874 Pelayanan	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	19 laporan	19 Laporan	100%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	32 Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	32 Fasilitasi	28 Fasilitasi	100,00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Dokumen	7 Dokumen	100%

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Dokumen	11 Dokumen	100%

2.2. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviw Terhadap Perubahan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kutorejo

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kutorejo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	2.665.476.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kutorejo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	2.665.476.900	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	8.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	8.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	4.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	4.200.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 dokumen	4.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 dokumen	4.300.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	2.316.932.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	2.316.932.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kutorejo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	2.316.932.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kutorejo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	2.316.932.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	92.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	92.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.500.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	143.742.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	143.742.700	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	54.342.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	54.342.700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	89.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	89.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	103.802.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	103.802.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	26.802.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	26.802.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	70.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21 Unit	7.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	7.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kutorejo	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	9.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kutorejo	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	9.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.260 pelayanan	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kutorejo	Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	1.260 pelayanan	9.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	9.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kutorejo	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	481.995.100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kutorejo	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	481.995.100	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	18 fasilitasi	481.995.100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	18 fasilitasi	481.995.100	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	18.100.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	18.100.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	18.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	18.500.000	

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	344.395.100	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	344.395.100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	101.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	101.000.000	
JUMLAH					3.156.472.000	JUMLAH					3.156.472.000

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan akan dilakukan tagging anggaran, dikarenakan pada sub kegiatan tersebut telah mendukung tematik (Program KLA, Kegiatan PKK, Kegiatan Penurunan Stunting).

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 1. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Kutorejo melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Mojosari secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.6
 (Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2025
 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

No.	Program/Keg / Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NI	HI		

Sumber data : Kecamatan Kutorejo

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengandemikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target			Anggaran				Keterangan
				APBD	APBD EFISIENSI	P-APBD	APBD	APBD EFISIENSI	P-APBD	Selisih	
1		2	4	5			6		11	12	
	KECAMATAN KUTOREJO						2.766.932.000	2.765.332.000	3.156.472.000	38.678.500	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82 (A)	82 (A)	2.566.932.000	2.579.432.000	2.665.476.900	86.044.900	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi	3 Inovasi					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	10.000.000	8.500.000	8.500.000	-	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	5.000.000	4.200.000	4.200.000	-	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	5.000.000	4.300.000	4.300.000	-	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.316.932.000	2.316.932.000	2.316.932.000	-	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	2.316.932.000	2.316.932.000	2.316.932.000	-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	75.000.000	89.000.000	92.500.000	3.500.000	

	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	2 paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000	40.000.000	40.000.000	-	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	3.500.000	1.500.000	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15.000.000	4.000.000	6.000.000	2.000.000	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	124.400.000	124.400.000	143.742.700	19.342.700	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	35.000.000	35.000.000	54.342.700	19.342.700	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	89.400.000	89.400.000	89.400.000	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	40.600.000	40.600.000	103.802.200	63.202.200	

	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	25.600.000	25.600.000	26.802.200	1.202.200	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	10.000.000	10.000.000	70.000.000	60.000.000	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	21 Unit	5.000.000	5.000.000	7.000.000	2.000.000	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	10.000.000	9.000.000	9.000.000	-	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.260 pelayanan	1.260 pelayanan	1.260 pelayanan	10.000.000	9.000.000	9.000.000	-	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	9.000.000	9.000.000	-	
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	190.000.000	176.900.000	481.995.100	305.095.100	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	27 fasilitasi	27 fasilitasi	18 fasilitasi	190.000.000	176.900.000	481.995.100	305.095.100	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	18.100.000	18.100.000	-	

	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	18.500.000	18.500.000	-	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	45.300.000	344.395.100	299.095.100	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	13 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000	95.000.000	101.000.000	6.000.000	

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankir P-Renja) OPD Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu 5 bulan ke depan, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankir P-Renja) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, P-Renja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Harapannya adalah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Rankir P-Renja) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan perubahan renja serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan

antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di tingkat Kabupaten.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- b. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari P-APBD dengan harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, Renstra Kecamatan Kutorejo Tahun 2025-2029, dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan antar bidang dan perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan harapan Perubahan Renja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2025 disusun dan semoga dapat bermanfaat serta berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 yang akan dicapai.

Mojokerto, Juni 2025

PLT. CAMAT KUTOREJO

KUKUH RADIDTYO, SH., MH
PEMBINA
NIP. 19780306 200312 1 004

